



MODUL PERTEMUAN 8

EKONOMI MAKRO

Perdagangan Internasional

Dosen Pengampu :

Bernardus Wishman Siregar, S.E, M.E

Materi :

Sejarah perdagangan internasional di Indonesia dan teori-teori pendukung.

Capaian Pembelajaran :

Mahasiswa mampu memahami bagaimana awal mula terjadinya perdagangan internasional di Indonesia serta kesesuaian dengan teori-teori pendukung kegiatan perdagangan internasional.

Pada modul kali ini, pembaca diharapkan dapat memahami bagaimana sejarah kegiatan perdagangan internasional yang dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung. Selain itu juga pembaca diharapkan dapat mulai mengenal kegiatan ekspor dan impor yang mendasari terjadinya perdagangan internasional khususnya di Indonesia.

Proses perdagangan internasional menjadikan terbentuknya proses infiltrasi budaya luar ke masyarakat lokal. Sehingga tidak dapat dipungkiri kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim memiliki kekuatan ekonomi yang lebih kuat dalam mengatur wilayah kekuasaannya. Bukan hanya proses akulturasi budaya serta ekonomi yang tercipta dalam perdagangan internasional, namun juga proses penyebaran agama.

Perkembangan peradaban di Indonesia dibangun melalui jalur perdagangan yang sudah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya. Jalur perdagangan yang terbentuk bertalian erat hubungannya dengan pesisir pantai dan lautan sebagai zona maritim di wilayah Pantai Utara Jawa, Pantai Makasar, dan wilayah Maluku. Hal ini disebabkan karena masyarakat lepas pantai umumnya bukan hanya memanfaatkan lautan untuk memenuhi kebutuhan pangan lautan dengan berprofesi sebagai nelayan, tetapi lebih dari itu, bahwa pesisir pantai dan lautan dijadikan bandar perdagangan.

Berlangsungnya perdagangan internasional di wilayah pesisir Indonesia tersebut sayangnya tidak berlangsung lama. Perebutan politik hegemoni kekuatan asing masuk melalui pelabuhan-pelabuhan strategis untuk menjalankan monopoli dagang yang kerap kali mengintervensi kerajaan-kerajaan wilayah pesisir. Hingga akhirnya timbul peperangan yang tidak dapat dihindarkan. Alhasil kekuatan asing mampu menakhlukkan kerajaan-kerajaan maritim dengan sistem monopoli perdagangan mereka. Salah satu komoditas bersaing pada masa itu mengenai riwayat rempah-rempah Indonesia yang mampu mengubah perdagangan global. Khasiat serta kelangkaan nilai rempah yang tinggi menimbulkan hasrat penjelajah samudera dari benua Eropa untuk menemukan tempat tumbuh rempah. Dari sinilah dapat diketahui bahwa Indonesia sejak sebelum kerajaan Mataram menjadi produsen rempah nomor satu di dunia (Geographic, 2016).

Bertepatan dengan jumlah impor yang kian mendesak produksi pertanian dalam negeri, maka penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Sehingga Republik Indonesia bisa sepenuhnya benar-benar mewujudkan kedaulatan pangan terhadap berbagai komoditas sektor pertanian. Fitrah alam Indonesia sebagai negara agraris sudah semestinya menyebabkan masyarakatnya turun-temurun dengan aktivitas komoditas pertanian lokal. Hal ini pula yang menyebabkan hampir 30.7 juta pedagang menggantungkan hidup pada pasar tradisional. Nadi kehidupan inilah yang menjadi promotor ekonomi-sosial di masyarakat serta turut menjadi penggerak ketahanan pangan nasional. Peranan penting ketahanan pangan guna memberantas kemiskinan, sebab masyarakat prasejarah di Indonesia dapat menghabiskan lebih dari 50% pendapatannya untuk membeli bahan pangan. Sehingga terjangkaunya harga pangan juga akan mengangkat beban masyarakat berpenghasilan rendah (Ansori, 2017).

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.

Model Adam Smith memfokuskan pada keuntungan mutlak yang menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan mutlak dikarenakan negara

tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Menurut teori ini jika harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional. Di sisi lain, model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. Dalam Sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi di mana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara. Selanjutnya Model Heckscher-Ohlin dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan teoritis model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal kedalam teori perdagangan internasional. Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-o, dikenal sebagai Pradoks Leontief, yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang padat karya dibanding barang padat modal dan sebagainya.

Dalam kegiatan perdagangan internasional kita mengenal ada kegiatan ekspor dan impor. Pengertian ekspor menurut keputusan menteri perdagangan dan perindustrian Nomor 182/MPP/KEP/4/1998 tentang ketentuan umum dibidang ekspor, menyatakan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari daerah kepabeanan suatu negara. Adapun daerah kepabeanan sendiri diartikan sebagai wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan udara serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan

landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Definisi ekspor adalah seluruh pengiriman barang dagangan keluar negeri melaluipelabuhan di seluruh wilayah Republik Indonesia baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial. Nilai ekspor adalah nilai transaksi barang ekspor sampai atas kapal pelabuhan muat dalam keadaan *free on board (FOB)*. Jadi hasil yang diperoleh dari kegiatan ekspor adalah berupa nilai sejumlah uang dalam bentuk valuta asing atau yang biasa disebut dengan devisa , yang merupakan salah satu sumber pemasukan Negara. Sehingga ekspor adalah kegiatan perdagangan yang memberikan rangsangan guna menimbulkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan timbulnya industri-indutri pabrik besar, bersamaan dengan struktur positif yang stabil dan lembaga sosial yang efisien. Ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting dan melalui perluasan pasar sektor industri akan mendorong sektor indutri lainnya dan perekonomian, kesimpulannya ekspor merupakan sumber devisa ditambah perluasan pasar bagi produksi barang domestik dan perluasan tenaga kerja.

Berdasarkan teori klasik Adam Smith '*Absolute Advantage*' yang menekankan bahwa perdagangan bebas pasti akan membawa suatu keuntungan bagi negara yang melakukan perdagangan. Maka suatu negara yang mampu melakukan produksi barang/jasa diharapkan tidak hanya mampu memproduksi barang/jasa untuk kebutuhan dalam negerinya saja tetapi juga mampu untuk melakukan ekspor ke negara lain,sehingga akan meningkatkan pendapatan negara melalui devisa ekspor tersebut. Manfaat kegiatan ekspor :

- 1) **Memperluas pasar bagi produk dalam negeri; kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk suatu Negara ke luar negeri. Misalnya, pakaian batik merupakan salah satu produk Indonesia yang mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Apabila permintaan terhadap pakaian batik buatan Indonesia semakin meningkat, pendapatan para produsen batik semakin besar. Dengan demikian, kegiatan produksi batik di Indonesia akan semakin berkembang.**
- 2) **Menambah devisa negara; perdagangan antar negara memungkinkan eksportir suatu Negara untuk menjual barang kepada masyarakat luar**

negeri. Transaksi ini dapat menambah penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

- 3) **Memperluas lapangan kerja; kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia, kegiatan produksi di dalam negeri akan meningkat. Semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga lapangan kerja semakin luas.**

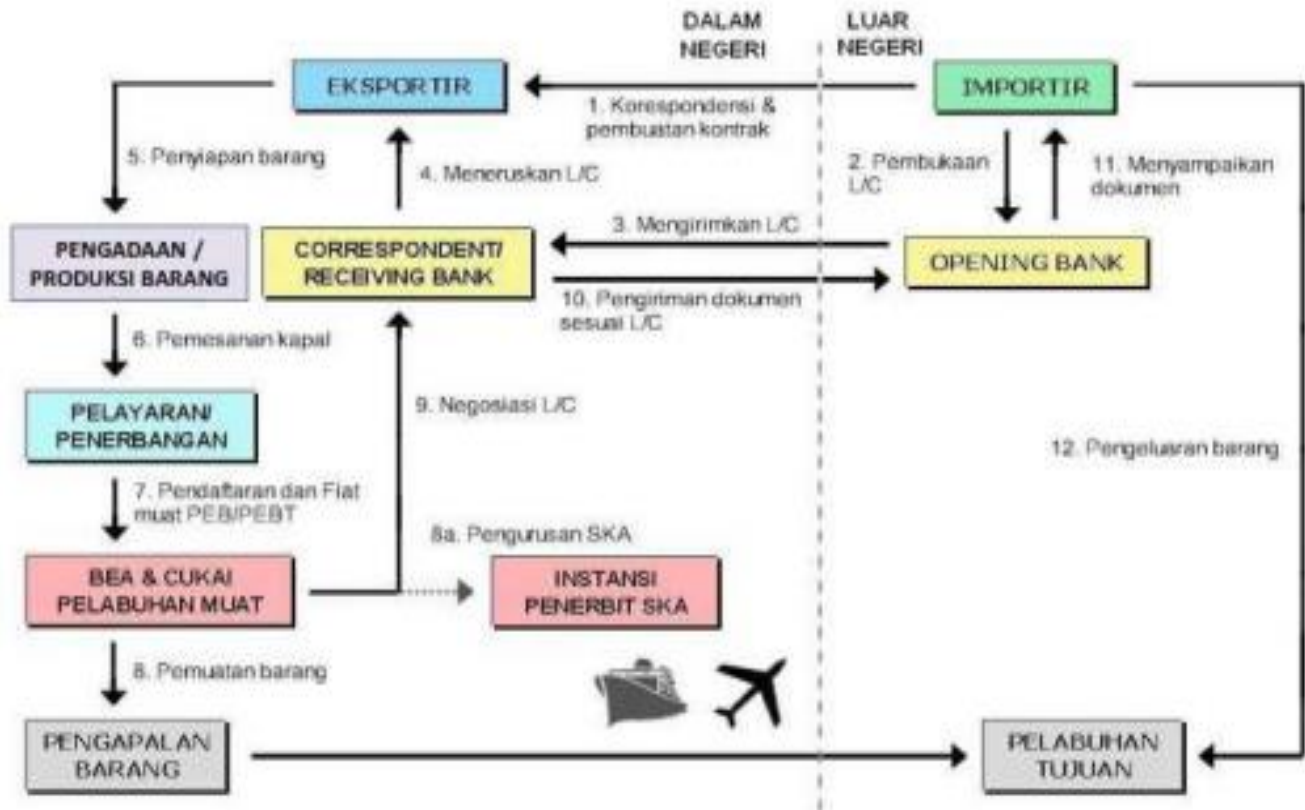
Ekspor suatu negara harus lebih besar daripada impor agar tidak terjadi defisit dalam neraca pembayaran. Oleh sebab itu pemerintah selalu berusaha mendorong ekspor melalui kebijakan ekspor dengan cara berikut :

- 1) **Diversifikasi Ekspor/Menambah Keragaman Barang Ekspor ; diversifikasi ekspor merupakan penganekaragaman barang ekspor dengan memperbanyak macam dan jenis barang yang diekspor. Misalnya Indonesia awalnya hanya mengekspor tekstil dan karet, kemudian menambah komoditas ekspor seperti kayu lapis, gas LNG, rumput laut dan sebagainya. Diversifikasi ekspor dengan menambah macam barang yang diekspor ini dinamakan diversifikasi horizontal. Sedangkan diversifikasi ekspor dengan menambah variasi barang yang diekspor seperti karet diolah dahulu menjadi berbagai macam ban mobil dan motor atau kapas diolah dulu menjadi kain lalu diproses menjadi pakaian. Diversifikasi yang demikian ini disebut diversifikasi vertikal.**
- 2) **Subsidi ekspor ; subsidi ekspor diberikan dengan cara memberikan subsidi/bantuan kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkutan yang murah, kemudahan dalam mengurus ekspor, dan kemudahan dalam memperoleh kredit dengan bunga yang rendah.**
- 3) **Premi ekspor ; untuk lebih menggiatkan dan mendorong para produsen dan eksportir, pemerintah dapat memberikan premi atau insentif, misalnya penghargaan atas kualitas barang yang diekspor. Pemberian bantuan keuangan dari pemerintah kepada pengusaha kecil dan menengah yang orientasi usahanya ekspor.**

- 4) **Devaluasi ; devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri (rupiah) terhadap mata uang asing. Dengan kebijakan devaluasi akan mengakibatkan harga barang ekspor di luar negeri lebih murah bila diukur dengan mata uang asing (dollar), sehingga dapat meningkatkan ekspor dan bisa bersaing di pasar internasional.**
- 5) **Meningkatkan Promosi Dagang ke Luar Negeri ; pemasaran suatu produk dapat ditingkatkan dengan mempromosikan produk yang akan dijual. Untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri maka pemerintah dapat berusaha dengan melakukan promosi dagang ke luar negeri, misalnya dengan mengadakan pameran dagang di luar negeri agar produk dalam negeri lebih dapat dikenal.**
- 6) **Menjaga Kestabilan Nilai Kurs Rupiah terhadap Mata Uang Asing ; kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing sangat dibutuhkan oleh para importir dan pengusaha yang menggunakan peroduk luar negeri untuk kelangsungan usaha dan kepastian usahanya. Bila nilai kurs mata uang asing terlalu tinggi membuat para pengusaha yang bahan baku produksinya dari luar negeri akan mengalami kesulitan karena harus menyediakan dana yang lebih besar untuk membiayai pembelian barang dari luar negeri. Akibatnya harga barang yang diproduksi oleh pengusaha tersebut menjadi mahal. Hal ini dapat menurunkan omzet penjualan dan menurunkan laba usaha, yang akhirnya akan mengganggu kelangsungan hidup usahanya.**
- 7) **Mengadakan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional ; melakukan perjanjian kerja sama ekonomi baik bilateral, regional maupun multilateral akan dapat membuka dan memperluas pasar bagi produk dalam negeri di luar negeri. serta dapat menghasilkan kontrak pembelian produk dalam negeri oleh negara lain. Misalnya perjanjian kontrak pembelin LNG (Liquid Natural Gas)**

Selanjutnya kita dapat melihat bagaimana prosedur ekspor yang secara umum dapat dilakukan :

PROSEDUR EKSPOR



Sumber : www.djpen.kemendag.go.id

Menurut Amir M.S. (2003), dalam melaksanakan ekspor ke luar negeri dapat dilakukan dengan beberapa cara , yaitu :

- 1) Ekspor Biasa ; dalam hal ini barang di kirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir di luar negeri. Sesuai dengan peraturan devisa yang berlaku maka hasil devisa yang di peroleh dari ekspor ini dapat di jual kepada Bank Indonesia, sedangkan eksportir menerima pembayaran dalam mata uang rupiah sesuai dengan penetapan nilai kurs valuta asing yang ditentukan dalam bursa valuta, atau juga dapat dipakai sendiri oleh eksportir.
- 2) Barter ; barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang, tidak menerima pembayaran di dalam mata uang rupiah. Kalau kita mempelajari sejarah masyarakat primitif

ataupun masyarakat suku terasing, maka kebanyakan cara yang mereka tempuh dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan cara tukar menukar apa yang dipunyai (diproduksinya) dengan barang apa yang di miliki tetangganya.

- 3) **Konsinyasi (*Consignment*)** ; adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk di jual sedangkan hasil penjualannya diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa. Jadi, dalam hal ini barang di kirim ke luar negeri bukan untuk ditukarkan dengan barang lain seperti dalam hal barter, dan juga bukan untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah dilakukan seperti dalam hal ekspor biasa.
- 4) ***Package-Deal*** ; dalam rangka memperluas pasaran hasil bumi Indonesia terutama dengan negara sosialis, pemerintah adakalanya mengadakan perjanjian perdagangan (*trade agreement*) dengan salah satu negara pada perjanjian ditetapkan sejumlah barang tertentu akan diekspor ke negara itu dan sebaliknya dan dari negara itu akan diimpor sejumlah jenis barang yang dihasilkan dari negara tersebut dan yang kita butuhkan. Pada prinsipnya semacam barter, namun terdiri dari aneka komoditi.
- 5) **Penyelundupan (*smuggling*)** ; setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku dapat dianggap sebagai usaha penyelundupan atau *smuggling*. Bahaya dari setiap penyelundupan terletak pada adanya pelarian kekayaan ke luar negeri (*assets flight*) tanpa mendapatkan suatu kompensasi. Hal ini berarti suatu pengurangan atas kekayaan negara dan masyarakat.

Selanjutnya kita dapat memahami mengenai kegiatan impor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:427) impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Sedangkan menurut undang – undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa impor yaitu kegiatan ekonomi dengan mendatangkan barang dari luar wilayah ke dalam wilayah.

Dalam statistik perdagangan internasional impor sama dengan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Impor mempunyai sifat yang berlawanan dengan ekspor. Ekspor dapat dikatakan sebagai rangsangan bagi perekonomian namun impor merupakan kebocoran dalam pendapatan nasional. Impor ditentukan oleh kesanggupan / kemampuan dalam meghasilkan barang-barang yang bersaing dengan buatan luar negeri. Yang berarti nilai impor tergantung dari nilai tingkat pendapatan nasional negara tersebut. Makin tinggi tingkat pendapatan nasional , serta semakin rendah kemampuan dalam menghasilkan barangbarang tertentu , maka impor pun akan semakin tinggi. Sebagai akibatnya banyak kebocoran dalam pendapatan nasional.

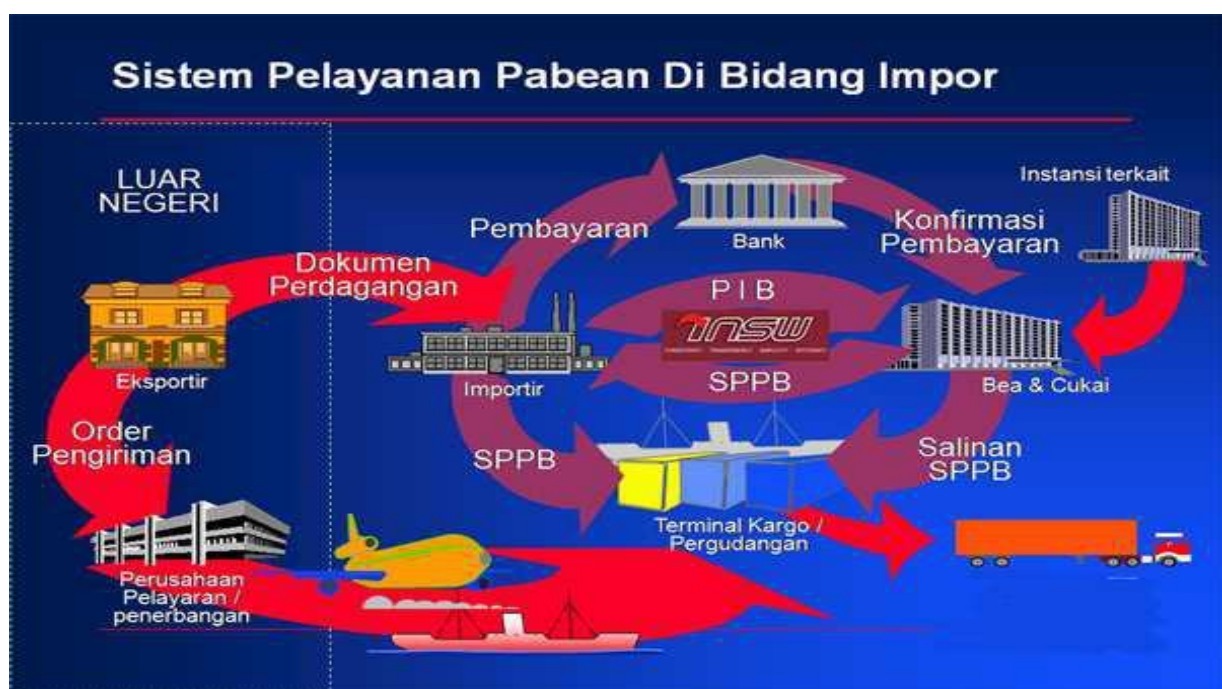
Kegiatan impor di satu pihak sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi di lain pihak dapat merugikan perkembangan industri dalam negeri. Agar tidak merugikan produk dalam negeri diperlukan adanya kebijakan impor untuk melindungi produk dalam negeri (proteksi) dengan cara berikut :

- 1) **Pengenaan Bea Masuk ;** barang impor yang masuk ke dalam negeri dikenakan bea masuk yang tinggi sehingga harga jual barang impor menjadi mahal. Hal ini dapat mengurangi hasrat masyarakat membeli barang impor dan produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor.
- 2) **Kuota Impor ;** kuota impor merupakan suatu kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Dengan dibatasinya jumlah produk impor mengakibatkan harga barang impor tetap mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing dan laku di pasaran.
- 3) **Pengendalian Devisa ;** dalam pengendalian devisa, jumlah devisa yang disediakan untuk membayar barang impor dijatah dan dibatasi sehingga importir mau tidak mau juga membatasi jumlah barang impor yang akan dibeli.
- 4) **Substitusi Impor ;** kebijakan mengadakan substitusi impor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong

produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri barang-barang yang diimpor dari luar negeri.

- 5) Devaluasi ; kebijakan berupa devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Misalnya: 1US\$ = Rp8.000,00 menjadi 1US\$ = Rp 10.000,00. Dengan devaluasi dapat menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal, dihitung dengan mata uang dalam negeri, sehingga akan mengurangi pembelian barang impor.

Bagaimana prosedur impor dapat kita lihat berikut ini :



Prosedur umum proses impor di Indonesia melalui INSW (*Indonesia National Single Window*) adalah sebagai berikut :

- 1) Importir mencari supplier barang sesuai dengan yang akan diimpor.
- 2) Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang mau diimpor; kemudian antar Bank ke Bank Luar Negeri untuk menghubungi Supplier dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.

- 3) Barang-barang dari Supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk diajukan.
- 4) Supplier mengirim faks ke Importer document B/L, Inv, *Packing List* dan beberapa dokumen lain jika disyaratkan (Serifikat karantina, Form E, Form D, dsb)
- 5) Original dokumen dikirim via Bank / original kedua ke importir
- 6) Pembuatan/ pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika importir mempunyai Modul PIB dan EDI (*Electronic Data Interchange*) System sendiri maka importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB nya.
- 7) Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu Importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.
- 8) Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak)
- 9) Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
- 10) Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
- 11) Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (*Analizing Point*) terkait Lartas.
- 12) Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB
- 13) Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.

- 14) Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan *Analyzing Point* di SKP
- 15) Jika data benar akan dibuat penjaluran
- 16) Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
- 17) Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
- 18) Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB
- 19) Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB

Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif (*tariff barrier*) dan kebijakan hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*).

Hambatan tarif (*tariff barrier*) adalah suatu kebijakan proteksi terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman banyaknya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri. Tarif adalah hambatan perdagangan yang berupa penetapan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean (*custom area*). Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Dengan pengenaan bea masuk yang besar, pendapatan negara akan meningkat sekaligus membatasi permintaan konsumen terhadap produk impor dan mendorong konsumen menggunakan produk domestik.

Selain masalah/kendala dalam bentuk tariff bea masuk, masih terdapat berbagai macam masalah/kendala yang sengaja diciptakan untuk menghalangi masuknya barang ke dalam peredaran suatu negara. Yaitu kendala impor non tarif seperti :

- 1) **Anti-Dumping atau *Countervailing Duties*** ; yang dimaksud dengan anti-dumping yang lazim disebut dengan *countervailing duties* adalah bea yang dipungut oleh negara pengimpor atas komoditi yang terbukti mendapat subsidi dari pemerintah negara pengekspor. Dalam tahun 1984 ekspor tekstil kita hampir saja dikenakan *countervailing duties* ini oleh Pemerintah Amerika Serikat.
- 2) **Pajak Impor** ; yang dimaksud dengan pajak impor adalah pajak yang dipungut atas komoditi impor disamping bea-masuk. Dengan berlakunya Undang-undang pajak yang baru, setiap barang impor dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10%.
- 3) **Ijin Impor dan alokasi devisa** ; yang dimaksud dengan ijin impor dan alokasi devisa ialah bila pemerintah secara umum melarang impor kecuali bagi mereka yang memperoleh ijin impor dan sekaligus memberikan jatah (alokasi) devisa untuk membiayai impor itu.
- 4) **Kontraksi Rupiah dan mempengaruhi harga impor** ; yang dimaksud dengan kontraksi rupiah ialah tindakan bank yang mengetatkan kredit impor dengan cara memaksa importir menyetor deposito untuk pembukaan L/C. Dengan demikian di satu pihak bank menyedot uang dalam peredaran melalui impor dan di lain pihak kalkulasi impor menjadi lebih mahal karena bunga dan peredaran (*turn-over*) menjadi lamban. Dengan sendirinya barang impor sulit bersaing dengan produksi lokal.
- 5) ***Approved Traders* (Importer)** ; yang dimaksud dengan *approved importer* adalah pemerintah dengan sadar membatasi importir untuk komoditi tertentu, sehingga kuantum, mutu, harga dan distribusi komoditi tersebut secara langsung dapat dikendalikan Pemerintah. Pola ini merupakan taraf awal dari timbulnya monopoli atau oligopoly dalam impor komoditi tertentu. Contoh dari *approved importers* ini adalah cengkeh, bahan baku plastik, gandum, besi baja.
- 6) **Impor-Quota** ; yang dimaksud dengan impor quota adalah pembatasan yang ditetapkan negara pengimpor atas jenis dan jumlah dari suatu komoditi yang boleh diimpor dari suatu negara lain. Kuota impor ini misalnya yang

diterapkan oleh Pemerintah Amerika terhadap tekstil Indonesia atau Kuota Kopi yang berlaku bagi anggota ICO (*International Coffee Organization*)

KESIMPULAN

Kita telah memahami bagaimana proses kegiatan perdagangan internasional yang didasarkan pada kegiatan ekspor dan impor khususnya di Indonesia. Banyak istilah baru yang mungkin anda baru mengetahui dan diharapkan dapat dipahami selaku insan akademik dan pelaku ekonomi. Tanpa disadari bahwa kita merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional dan harus memahami sisi positif dan negatifnya. Hal tersebut telah dibahas secara detail dan mari kita saling menjaga keseimbangan ekonomi Indonesia dengan memilih sisi positif dari perdagangan internasional.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Silahkan mencari melalui berbagai referensi bagaimana kondisi kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan masyarakat Indonesia saat ini. Berikan pendapat anda apakah mayoritas perdagangan internasional yang dilakukan lebih pada memberikan sisi positif atau negatif kepada perekonomian Indonesia?

Daftar Pustaka

Marzuki (2018). Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Nopirin. (2000). Ekonomi Internasional. Yogyakarta: BPFE.

Samuelson, Nordhaus, (2001), Ilmu Makroekonomi, Edisi 17, PT. Media Global Edukasi.

T. Gilarso. (2002). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Edisi Revisi. Penerbit Kanisius

